

WANITA INDONESIA DAN KESEMPATAN KERJA

Nancy Kumalasari SUHUT*

Masalah kesempatan kerja merupakan suatu hal yang sering menjadi pusat pembicaraan dan seringkali dihubungkan dengan latar belakang pendidikan, usia dan penawaran tenaga kerja dalam masyarakat. Tidak jarang pula orang melihat bahwa masalah kesempatan kerja lebih banyak berhubungan dengan kaum pria, terutama melihat peranan pria sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk membiayai hidup keluarganya. Dalam tulisan ini akan dibahas masalah kesempatan kerja yang ditinjau dari sudut yang agak berbeda yaitu peranan wanita dalam mengisi kesempatan kerja yang ada.

Dalam banyak hal seringkali kaum wanita dianggap kurang penting atau kurang menonjol karena beberapa alasan tertentu, seperti dianggap kurang mampu atau kurang cocok untuk melakukan suatu pekerjaan di luar rumah. Keadaan ini tidak hanya terjadi di negara-negara sedang berkembang saja tetapi juga di negara-negara maju yang tampaknya kehidupan kaum wanita sudah lebih bebas. Hal inilah yang sering menimbulkan pertentangan ataupun kesulitan bagi kaum wanita dalam mengembangkan karirnya. Peranan jenis kelamin ternyata cukup besar dalam menentukan suatu jabatan atau posisi tertentu, baik di tingkat yang paling rendah maupun di tingkat yang paling tinggi. Seorang wanita yang memegang pucuk pimpinan, baik di perusahaan, organisasi maupun pemerintahan seringkali dinilai ingin menguasai kaum pria atau kurang bersifat feminin bahkan dianggap menyalahi kodratnya sebagai seorang wanita. Alasan-alasan demikian ini merupakan salah satu penghambat kemajuan kaum wanita. Dalam uraian selanjutnya akan dibahas peranan wanita dalam masyarakat dan hubungannya dengan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam usaha mengembangkan karir mereka.

* Staf CSIS

PERANAN WANITA INDONESIA DALAM MASYARAKAT

Dalam alam pembangunan dan dunia yang sedang berkembang ini tampaknya banyak kemajuan yang telah dialami oleh kaum wanita di Indonesia, baik dalam lapangan pendidikan, bisnis maupun politik. Beberapa jabatan kunci dalam suatu perusahaan sudah banyak yang diserahkan kepada kaum wanita, umumnya dalam jabatan tersebut dibutuhkan ketelitian dan ketekunan yang kebanyakan dimiliki oleh kaum wanita. Di samping itu dalam bidang pendidikanpun sudah terlihat sejumlah sarjana wanita, bahkan beberapa diantaranya sudah menjadi doktor, begitu juga dalam bidang-bidang lainnya. Walaupun demikian secara umum masih dapat dikatakan bahwa sebagian besar wanita Indonesia lebih senang menjadi ibu rumah tangga dan isteri yang baik daripada menjadi wanita karir yang sukses. Hal ini dapat dimengerti mengingat sejarah yang melatar belakangi kehidupan wanita Indonesia. Pada masa-masa yang lampau bahkan sekarangpun masih ada yang beranggapan seorang wanita tidak mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat, memperoleh pendidikan yang tinggi, memegang jabatan-jabatan penting dan sebagainya, tetapi mereka mempunyai kewajiban untuk mengatur rumah tangga, mengurus suami dan anak. Keadaan ini semakin lama dirasakan semakin menekan, kaum wanita merasa bahwa kehidupan dibalik dinding rumah secara terus menerus sangat membosankan. Mereka mulai menuntut hak-hak mereka sebagai manusia yang sama dengan kaum pria. Di Indonesia gerakan ini sudah muncul sejak permulaan abad ke-20 yang dipelopori oleh beberapa wanita yang berasal dari daerah-daerah yang berlainan dan bergerak dalam lapangan yang berlainan pula. Ada yang mulai usahanya dengan mengembangkan bidang pendidikan bagi kaum wanita, menggabungkan diri dengan pergerakan kemerdekaan yang pada waktu itu banyak bermunculan di daerah-daerah seluruh Indonesia, dan masih banyak usaha lain yang dilakukan oleh kaum wanita untuk mendapatkan persamaan hak dengan kaum pria. Usaha ini mendapat tantangan yang cukup keras dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan "tua" dan kaum pria. Mereka menganggap bahwa seorang wanita lebih cocok untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan terasa janggal apabila seorang wanita ikut berjuang memanggul senjata, berdebat dalam suatu sidang perwakilan rakyat, membantu pendirian jembatan dan lain-lain.

Apabila ditinjau dari sudut hukum, kitapun dapat melihat ketimpangan sejak jaman Hindia Belanda dulu. Pada jaman penjajahan Belanda, bagi penduduk Indonesia asli berlaku Hukum Adat yang mengatur berbagai hal termasuk perkawinan. Dalam hal perkawinan ini ada beberapa peraturan yang tampaknya berat sebelah, sehingga dirasakan kedudukan kaum wanita tidak sama atau lebih rendah daripada kedudukan kaum pria. Sebagai contoh dapat dikemukakan mengenai perkawinan poligami. Baik agama Islam maupun Hukum Adat pada dasarnya menyetujui poligami, yaitu seorang pria diijinkan

untuk mengambil isteri lebih dari seorang apabila isteri pertama tidak dapat menjalankan fungsinya, tidak dapat memberikan keturunan atau isteri berasal dari kalangan atau golongan yang lebih rendah. Sedangkan bagi kaum wanita pengecualian ini tidak ada, mereka harus taat pada adat dan secara tidak langsung dipaksakan untuk menerima kehendak sang suami. Apabila dalam Hukum Adat tampak adanya perbedaan hak antara pria dan wanita, maka dalam hukum publikpun ternyata terdapat keadaan yang serupa. Sebagai contoh, hak pilih yang dalam bidang politik merupakan hak yang terpenting bagi setiap warga negara. Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda hak pilih bagi kaum wanita dibatasi, sehingga pada waktu itu tidak ada wanita yang dapat menjadi kepala desa, kepala-kepala adat dan penjabat-penjabat lainnya.¹ Sebenarnya semua keadaan ini sengaja diciptakan oleh pihak penjajah, agar wanita Indonesia tetap terbelakang dan tidak terlampau banyak mengajukan tuntutan. Baru sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belenggu itu dapat disingkirkan dan alam kemerdekaan menciptakan suasana yang lain bagi wanita Indonesia untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Di sekolah-sekolah sudah tampak banyak murid dan guru wanita, di lembaga-lembaga pemerintahan, dalam kesatuan-kesatuan ABRI, ahli-ahli teknik dan lain-lain sudah banyak ditangani oleh kaum wanita. Kemajuan ini amat dirasakan sebagai suatu langkah baru bagi kaum wanita, terutama untuk negara yang sedang membangun ini kemajuan tersebut dirasakan sebagai suatu bantuan yang tidak kecil artinya.

Saat ini tidak hanya kaum pria yang menentukan masa depan bangsa, tetapi juga kaum wanita secara aktif dan bersama-sama dengan kaum pria menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Apabila kita melihat dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan dasar, lebih dari 50% tenaga pengajarnya adalah wanita.² Berikut ini akan diberikan suatu Tabel yang menunjukkan prosentase penduduk wanita yang berusia 10 tahun dan lebih menurut pendidikan yang ditamatkan dan daerah. Dalam Tabel tersebut ditunjukkan bahwa di daerah kota sekitar 20% (seperlima) dari jumlah seluruh wanita usia sekolah tidak mengalami pendidikan di bangku sekolah dan baru sekitar 25% (seperempat) yang memiliki ijazah SD, 20% memiliki ijazah sekolah lanjutan dan sekitar 0,75% yang memasuki perguruan tinggi. Sedangkan di daerah pedesaan keadaannya lebih parah lagi. 40% dari jumlah seluruh wanita usia sekolah tidak bersekolah, 18% memiliki ijazah SD, hanya sekitar 3% yang memiliki ijazah sekolah lanjutan dan hampir tidak ada yang memasuki perguruan tinggi (0,02%). Dari data di atas kita dapat melihat bahwa sebagian besar dari wanita Indonesia

1 Nani Soewondo, SH., *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta, Timun Mas NV, 1968), hal. 96

2 Onny S. Prijono dan AMW Pranarka, *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir: Bagian I (Permasalahan)* (Jakarta, CSIS, 1979), hal. 112

Tabel 1

PERSENTASE PENDUDUK WANITA YANG BERUSIA 10 TAHUN DAN LEBIH
MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DAN DAERAH

Pendidikan \ Daerah	Kota	Pedesaan	Kota + Pedesaan
Tidak sekolah	20,56	40,08	36,36
Belum tamat SD	33,33	38,25	37,31
SD	25,79	18,28	19,71
SLP Umum	10,05	2,08	3,59
SLP Kejuruan	2,14	0,50	0,81
SLA Umum	4,10	0,27	1,00
SLA Kejuruan	3,26	0,53	1,05
Akademi	0,57	0,02	0,12
Universitas	0,18	0,00	0,04
Jumlah Penduduk	100,00 8.566.197	100,00 36.467.524	100,00 45.033.721

Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional 1976, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia* (Jakarta, Biro Pusat Statistik, 1978)

belum dapat menikmati pendidikan di bangku sekolah dibandingkan dengan kaum pria. Keadaan inilah yang seringkali mengakibatkan kaum wanita tidak dapat menduduki jabatan-jabatan atau posisi tertentu, karena tidak adanya tenaga wanita yang trampil dalam bidang tersebut. Sebenarnya banyak lapangan pekerjaan yang dapat diisi oleh kaum wanita, seperti tenaga administrasi dan pembukuan, operator telepon, guru, hakim, pengacara, penterjemah dan lain sebagainya, yang kesemuanya ini dirasakan sesuai untuk dikerjakan oleh kaum wanita menurut kodratnya.

Seringkali orang tidak memahami arti dari persamaan hak antara pria dan wanita. Banyak orang mengartikan persamaan hak ini sebagai suatu persamaan mutlak, maksudnya apa yang dapat dilakukan oleh kaum pria harus dapat pula dilakukan oleh kaum wanita atau sebaliknya. Pendapat inilah yang sebenarnya mengaburkan arti dari persamaan hak itu sendiri. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan persamaan hak di sini adalah kesempatan yang sama yang diberikan kepada baik pria ataupun wanita untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Sebagai contoh setiap orang mempunyai hak pilih (dipilih dan memilih) yang sama sejauh tidak terkena sanksi-sanksi tertentu, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan imbalan yang sesuai dengan jasa yang telah diberikannya, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing, setiap orang berhak mendapat perlindungan yang sama di muka hukum apabila ia merasa kedudukan ataupun keamanannya terancam, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk

menentukan profesinya masing-masing dan sebagainya. Hal ini penting untuk diketahui, karena dalam menentukan suatu pilihan orang seringkali ragu-ragu dan banyak dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Pendapat orang lain inilah yang seringkali mengurangi kesamaan hak seseorang. Contoh yang umum, seorang gadis baru menamatkan pendidikannya di SMA dan hendak melanjutkan ke perguruan tinggi. Biasanya untuk memantapkan pilihan jurusan, ia bertanya pada orang tua atau orang yang lebih tua yang dianggap dapat memberikan pandangan yang baik. Tetapi seringkali orang tua tidak dapat menunjukkan jalan yang lebih baik, malah mengklasifikasikan bagian-bagian mana yang tidak cocok dan bagian-bagian mana yang cocok untuk wanita, dan lebih parah lagi orang tua yang masih berpikiran bahwa pada akhirnya wanita akan masuk ke dapur apabila ia sudah berumah tangga sehingga apa gunanya bersusah-susah untuk belajar di bangku perguruan tinggi. Keadaan inilah yang masih sering ditemui dalam masyarakat kita, sehingga masih sulit bagi seorang wanita untuk mencapai karir yang tinggi sejajar dengan kaum pria. Wanita karir "ditakuti" atau dianggap terlalu ambisius dan tidak dapat menjadi seorang isteri atau ibu yang baik. Anggapan inilah yang seringkali mematikan atau mematahkan kreativitas seorang wanita yang ingin mengembangkan diri lebih jauh, karena ia mencoba untuk menyingkirkan ambisinya jauh-jauh.

Suatu gejala umum yang banyak terlihat di Indonesia terutama di kota-kota besar adalah wanita-wanita karir palsu, maksudnya karena kedudukan suami maka wanita tersebut dapat menduduki suatu jabatan tertentu dalam organisasi yang juga dibentuk karena jabatan sang suami. Sebenarnya seorang wanita dapat merintis karirnya sejak ia mulai duduk di bangku sekolah menengah ataupun perguruan tinggi dan dikembangkan setelah ia terjun ke dalam masyarakat sesuai dengan bidang profesinya. Wanita yang demikian inilah yang kelak akan menjadi wanita karir yang sukses.

WANITA INDONESIA DAN KESEMPATAN KERJA

Lapangan pekerjaan saat ini dirasakan sebagai salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah pengangguran, ternyata wanita merupakan salah satu variabel yang turut menentukan besar kecilnya pengangguran sekaligus menentukan kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Menurut data statistik yang dapat dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik, tingkat pengangguran total di Indonesia dalam tahun 1976 mencapai 2,3% (tingkat pengangguran pria 2,7% dan tingkat pengangguran wanita 1,6%). Apabila diperinci menurut daerah, kota dan pedesaan, tingkat pengangguran total di daerah kota mencapai 6,3% (6,9% untuk pria dan 5,1% untuk wanita) sedangkan tingkat pengangguran total di daerah pedesaan hanya 1,6% (1,9% untuk pria dan 1,1% untuk wanita). Untuk lebih jelasnya maka berikut ini akan dilampirkan Tabel yang menyatakan tentang hal tersebut.

Tabel 2a

PENCARI KERJA MENURUT GOLONGAN UMUR DAN JENIS KELAMIN DI DAERAH KOTA*

Gol. umur	Yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan			Angkatan kerja			Tingkat pengangguran		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
10 - 14	13.937	5.676	19.613	72.330	73.808	146.138	19,3	7,7	13,4
15 - 19	122.740	37.656	160.396	466.030	318.996	785.026	26,3	11,8	20,4
20 - 24	142.422	46.570	188.992	764.538	322.598	1.107.136	18,2	14,4	17,1
25 - 29	41.856	12.984	54.840	723.933	236.658	960.591	5,8	5,5	5,7
30 - 34	11.813	2.491	14.304	688.836	230.890	919.726	1,7	1,1	1,6
35 - 39	7.884	1.487	9.371	719.747	260.961	980.708	1,1	0,6	1,0
40 - 44	5.236	983	6.219	565.097	230.659	795.756	0,9	0,4	0,8
45 - 49	5.083	362	5.445	467.197	177.037	644.234	1,1	0,2	0,8
50 - 54	4.192	338	4.530	331.696	134.619	466.315	1,3	0,3	1,0
55 - 59	2.492	-	2.492	184.377	72.764	257.141	1,4	0,0	1,0
60 - 64	498	110	608	111.912	52.810	164.722	0,4	0,2	0,4
65 +	652	-	652	102.252	35.276	137.528	0,6	0,0	0,5
Total	358.805	108.657	467.462	5.217.945	2.147.076	7.365.021	6,9	5,1	6,3

* Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional 1976, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia* (Jakarta, Biro Pusat Statistik, 1978)

Tabel 2b

PENCARI KERJA MENURUT GOLONGAN UMUR DAN JENIS KELAMIN DI DAERAH PEDESAAN*

Gol. umur	Yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan			Angkatan kerja			Tingkat pengangguran		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
10 - 14	36.869	17.652	54.521	1.246.180	710.406	1.956.586	3,0	2,5	2,8
15 - 19	213.509	63.712	277.221	3.291.435	1.840.482	5.131.917	6,5	3,5	5,4
20 - 24	152.586	45.851	198.437	2.914.333	1.576.896	4.491.229	5,2	2,9	4,4
25 - 29	51.521	10.643	62.164	2.940.543	1.681.789	4.622.332	1,8	0,6	1,3
30 - 34	19.693	4.453	24.146	2.828.924	1.588.730	4.417.654	0,7	0,3	0,5
35 - 39	10.445	6.516	16.961	3.415.388	1.939.410	5.354.798	0,3	0,3	0,3
40 - 44	8.766	2.262	11.028	2.750.111	1.602.041	4.352.152	0,3	0,1	0,3
45 - 49	6.057	1.933	7.990	2.554.273	1.273.191	3.827.464	0,2	0,2	0,2
50 - 54	2.143	-	2.143	1.813.024	911.156	2.724.180	0,1	0,0	0,1
55 - 59	360	474	834	1.101.684	526.615	1.628.299	0,0	0,1	0,1
60 - 64	-	511	511	885.581	428.373	1.313.954	0,0	0,1	0,0
65 +	788	511	1.299	909.603	335.763	1.245.368	0,1	0,2	0,1
Total	502.737	154.518	657.255	26.651.079	14.414.854	41.065.933	1,9	1,1	1,6

* Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional 1976, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia* (Jakarta, Biro Pusat Statistik, 1978)

Tabel 2c

PENCARI KERJA MENURUT GOLONGAN UMUR DAN JENIS KELAMIN DI DAERAH KOTA DAN PEDESAAN*

Gol. umur	Yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan			Angkatan kerja			Tingkat pengangguran		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
10 - 14	50.806	23.328	74.134	1.318.510	784.214	2.102.724	3,9	3,0	3,5
15 - 19	336.249	101.368	437.617	3.757.465	2.159.478	5.916.943	8,9	4,7	7,4
20 - 24	295.008	92.421	387.429	3.698.871	1.899.494	5.598.365	8,0	4,9	6,0
25 - 29	93.377	23.627	117.004	3.664.476	1.918.447	5.582.923	2,5	1,2	2,1
30 - 34	31.506	6.944	38.450	3.517.760	1.819.620	5.337.380	0,9	0,4	0,7
35 - 39	18.329	8.003	26.332	4.135.135	2.200.371	6.335.506	0,4	0,4	0,4
40 - 44	14.002	3.245	17.247	3.315.208	1.832.700	5.147.908	0,4	0,2	0,3
45 - 49	11.140	2.295	13.435	3.021.470	1.450.228	4.471.698	0,4	0,2	0,3
50 - 54	6.335	338	6.673	2.144.720	1.045.775	3.190.495	0,3	0,0	0,2
55 - 59	2.852	474	3.326	1.286.061	599.379	1.885.440	0,2	0,1	0,2
60 - 64	498	621	1.119	997.493	481.183	1.478.676	0,0	0,1	0,1
65 +	1.440	511	1.951	1.011.855	371.041	1.382.896	0,1	0,1	0,1
Total	861.542	263.175	1.124.717	31.869.024	16.561.930	48.430.954	2,7	1,6	2,3

* Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional 1976, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia* (Jakarta, Biro Pusat Statistik, 1978)

Ketiga Tabel tersebut menunjukkan bahwa angkatan kerja terbesar baik untuk pria maupun wanita terdapat pada mereka yang berusia antara 15 sampai 54 tahun (pria 85,52% dan wanita 86,50%) mencapai 85,86%. Sedangkan yang belum mendapat pekerjaan ataupun tidak bekerja sebagian terbesar adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 24 tahun (pria 73,27% dan wanita 73,64%). Keadaan kedua ini dapat menunjukkan 2 hal, yang pertama karena pada usia tersebut sebagian besar dari mereka masih bersekolah atau yang kedua menunjukkan bahwa mereka belum mempunyai ketrampilan khusus, mengingat usia tersebut adalah usia yang umum bagi siswa sekolah menengah atau tingkat permulaan di bangku perguruan tinggi. Melihat data di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan baik pria maupun wanita cukup besar, bahkan persentase antara pria dan wanita hampir sama walaupun jumlah absolutnya tentu saja berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat tertentu atau pada usia tertentu di mana seseorang mempunyai potensi besar untuk bekerja tidak tersedia lapangan kerja yang cukup sehingga mengakibatkan terjadinya pengangguran. Untuk kaum wanita hal ini lebih terasa, karena pada umumnya hanya menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLP saja, sehingga pada usia sekitar 15 sampai 19 tahun jumlah angkatan kerja wanita merupakan jumlah yang terbesar. Di samping itu ada faktor lain yang menyebabkan pada usia yang lebih tua jumlah angkatan kerja wanita semakin berkurang, banyak dari antara mereka yang telah berumah tangga dan tidak bekerja lagi tetapi hanya mengurus rumah tangga saja, dan dianggap bukan angkatan kerja.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa wanita Indonesia mempunyai peranan ganda, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita pekerja. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya angkatan kerja wanita, baik yang sudah bekerja maupun masih mencari pekerjaan. Saat ini wanita bekerja sudah umum di Indonesia. Ada wanita yang merangkap sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai wanita pekerja, atau hanya menjadi ibu rumah tangga atau hanya bekerja saja. Pada umumnya mereka bekerja sebagai tenaga "full time" dalam suatu perusahaan, tetapi ada juga yang bekerja sebagai tenaga "part time" misalnya sebagai guru, tenaga penyuluhan, peneliti dan sebagainya. Di samping itu masih banyak juga wanita Indonesia, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh pabrik dan lain-lain. Yang termasuk kelompok kedua ini biasanya mereka yang tidak berkesempatan untuk bersekolah atau terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya.

Di masyarakat timbul pertentangan pendapat sehubungan dengan munculnya profesi-profesi baru wanita seperti kondektur, pengemudi bus dan truk, sampai hostess di kelab malam. Di satu pihak masyarakat tidak setuju pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga fisik dilakukan oleh

wanita. Di lain pihak, tuntutan "emansipasi" menghendaki segala pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pria dapat pula dikerjakan oleh wanita. Sebenarnya yang dimaksud dengan "emansipasi" dalam hal ini masih membutuhkan pembatasan yang lebih jelas.

Dengan demikian, perbedaan upah antara pria dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama merupakan masalah yang lebih penting ditinjau lebih lanjut daripada hanya membicarakan masalah emansipasi yang belum jelas batasannya. Beberapa perusahaan besar ataupun perusahaan-perusahaan asing yang berada di kota-kota besar kurang suka atau sama sekali menghindari penerimaan pegawai wanita, terutama yang sudah berkeluarga, dengan alasan apabila mereka melahirkan harus diberikan cuti hamil 3 bulan dan gaji harus dibayarkan penuh. Hal ini dianggap sebagai kerugian, terutama oleh perusahaan-perusahaan komersial besar. Apabila di Indonesia ada FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) dan Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, sebenarnya aneh kalau hal ini tidak dapat diselesaikan, karena melalui FBSI segala persoalan yang menyangkut masalah perburuhan dapat dipertanggungjawabkan dan melalui Menteri Muda Urusan Peranan Wanita diharapkan kedudukan kaum wanita Indonesia sungguh-sungguh diperhatikan dan dihargai sebagaimana mestinya.

Perbedaan lapangan pekerjaan antara wanita yang bekerja di daerah kota dan di daerah pedesaan antara lain ada hubungannya dengan mata pencaharian penduduk setempat. Di daerah pedesaan pada umumnya mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah bertani, sehingga kebanyakan para wanita yang bekerja di daerah tersebut juga bekerja di lapangan pertanian. Sedangkan di daerah kota yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang jasa, seperti administrasi, keuangan, kesekretariatan dan lain-lain, bidang perdagangan, pendidikan, komunikasi dan sebagainya. Terutama di kota-kota besar yang banyak memiliki perusahaan-perusahaan atau perkantoran-perkantoran besar, akan dapat kita jumpai banyak sekali pekerjaannya. Di kota-kota besar kita jumpai beberapa jabatan yang biasa hanya dipegang oleh kaum pria, kini sudah ditangani oleh kaum wanita. Sebagai contoh, dalam beberapa perusahaan besar sudah banyak dijumpai tenaga pimpinan (manajer) wanita, demikian pula sektor-sektor lainnya seperti perindustrian, perdagangan, bahkan di lembaga-lembaga pemerintahanpun sudah tampak para wanita yang memegang beberapa jabatan penting. Khusus untuk lembaga-lembaga pemerintahan ini tidak hanya di kota-kota besar tetapi di kota-kota kecil bahkan sampai ke daerah pedesaanpun sudah banyak pemimpin-pemimpin wanita, seperti jabatan kepala desa (lurah) atau pejabat-pejabat di kantor wilayah daerah. Kenyataan-kenyataan di atas cukup membesarkan hati dan merupakan salah satu bukti bahwa perjuangan wanita

Indonesia untuk mendapatkan persamaan hak dengan kaum pria mulai terealisasi.

Kenyataan lain menunjukkan bahwa kesempatan kerja untuk kaum wanita semakin terbuka walaupun belum sebesar untuk kaum pria. Lapangan kerja untuk kaum wanita mulai tampak baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil dan masyarakat mulai dapat menerima kenyataan bahwa bukan hanya kaum pria saja yang berhak dan berkewajiban untuk mengisi kesempatan kerja yang ada melainkan semua orang yang mampu dan trampil. Di samping itu perbedaan standar upah antara pria dan wanita tidak kita jumpai dalam lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga swasta nonprofit (umumnya lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan) dan beberapa perusahaan yang hanya menilai seseorang dari kemampuannya bekerja, tidak dari jenis kelaminnya. Namun masih ada perusahaan swasta yang mengadakan pembedaan standar upah secara ketat antara pria dan wanita dan tidak mau menerima pegawai wanita yang sudah berumah tangga atau tidak memberikan cuti hamil, tunjangan kelahiran dan sebagainya. Keadaan inilah yang masih harus diperjuangkan oleh kaum wanita agar dapat segera dihapuskan, karena bagaimanapun juga baik wanita maupun pria sama-sama manusia, bukan mesin, masing-masing mempunyai potensi yang berbeda yang antara keduanya dapat dikombinasikan untuk mendapatkan hasil yang paling memuaskan. Pembagian kerja yang baik antara pria dan wanita sebenarnya dapat dilakukan dengan cara berikut, pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak membutuhkan tenaga (kerja fisik) sebaiknya dilakukan oleh kaum pria dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak membutuhkan ketelitian dilakukan oleh kaum wanita. Misalnya di pabrik alat-alat elektronik banyak dipekerjakan buruh wanita, karena untuk melakukan pekerjaan pemasangan peralatan dibutuhkan ketelitian, mengingat alat yang dipasangpun sangat kecil dan halus. Namun disayangkan sampai saat ini nasib buruh wanita masih jauh dari apa yang diharapkan. Apabila buruh pria merasakan berat pekerjaan yang harus dilakukan tidak berimbang dengan upah yang diterima, keadaan buruh wanita lebih menyedihkan lagi, mereka harus bekerja seperti buruh pabrik pada umumnya (secara bergantian selama 24 jam) kadang-kadang bekerja pagi, kadang sore, dan kadang-kadang tengah malam, dengan upah yang lebih kecil daripada buruh pria dan pandangan masyarakat yang cenderung negatif, di samping keamanan sebagai wanita yang harus bepergian pada malam hari kurang terjamin. Sampai saat ini pemerintah belum melakukan tindakan nyata untuk melindungi mereka. Sebenarnya diharapkan melalui FBSI nasib mereka dapat diperjuangkan, tetapi dalam kenyataannya FBSI-pun belum dapat melakukan suatu tindakan yang berarti yang dapat mengatasi namakan mereka. Di samping itu diharapkan perhatian dari Menteri Muda Urusan Peranan Wanita untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Hanya melalui kedua jalur tersebut diharapkan nasib mereka akan

diperhatikan dan lambat laun mengalami perbaikan yang berarti, sehingga merekapun merasa tenang untuk melakukan pekerjaannya dan mempertahankan martabat mereka sebagai seorang wanita.

Apabila kita melihat usaha PBB untuk menjadikan wanita sebagai salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan dengan dijadikannya tahun 1975 sebagai tahun wanita internasional dan di negara-negara maju timbul gerakan-gerakan "women libs" maka di Indonesia sebenarnya sudah waktunya pula untuk melakukan suatu tindakan nyata yang memperjuangkan keadilan bagi kaum wanita. Maksud perjuangan di sini tentunya tidak seekstrem gerakan-gerakan yang dilakukan di negara-negara maju, tetapi suatu tindakan yang melindungi hak-hak wanita dan mengangkat martabat wanita sebagaimana mestinya. Usaha Pemerintah Indonesia mensahkan Undang-undang Perkawinan pada tahun 1974 sebenarnya sangat besar artinya bagi wanita Indonesia, karena dengan demikian berarti bahwa kaum wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum pria di muka hukum berkaitan dengan masalah perkawinan. Usaha ini berlangsung lama dan mendapatkan banyak tantangan sebelum pengesahannya. Walaupun UU Perkawinan telah disahkan, ini tidak berarti bahwa perjuangan kaum wanita telah selesai, karena ternyata masih banyak hal yang harus diselesaikan antara lain kedudukan buruh wanita dan perlindungan hukum bagi mereka.

Peranan wanita sebagai ibu rumah tangga tentu saja sangat berbeda dengan wanita yang bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering jumpai seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja. Di antara mereka itu ada yang bekerja hanya untuk mengisi waktu, mengembangkan karir dan semacam itu, tetapi ada juga yang bekerja karena keadaan keluarga yang mendeesak, penghasilan suami tidak mencukupi, atau suami sudah tidak dapat bekerja lagi. Bagi mereka yang termasuk dalam kelompok pertama biasanya tidak ada persoalan dengan penghasilan yang diperoleh karena umumnya mereka berasal dari keluarga yang berkecukupan tetapi yang mereka pentingkan adalah pekerjaan yang cocok dan tidak menjemukan. Lain halnya dengan kelompok kedua, mereka mencari pekerjaan karena desakan dari luar, jadi bukan atas keinginan diri sendiri (walaupun inisiatif datangnya dari diri sendiri), mereka umumnya mencari pekerjaan yang sungguh-sungguh dapat menunjang ekonomi rumah tangga dan biasanya mereka lebih mementingkan penghasilan yang diperoleh daripada perasaan senang akan pekerjaan yang dilakukan. Kedua kelompok ini menciptakan kebutuhan pekerjaan yang berbeda dan seringkali bertentangan satu sama lain. Untuk mereka yang termasuk dalam kelompok pertama jenis pekerjaan yang diminati biasanya berhubungan dengan hobby (kesenangan), ketrampilan (keahlian), latar belakang pendidikan dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Sedangkan mereka yang termasuk dalam kelompok kedua biasanya lebih cenderung memilih pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan tanpa memperhatikan cocok atau tidaknya pekerjaan tersebut bagi mereka.

PENUTUP

Dalam alam pembangunan ini masalah kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang cukup penting untuk diperhatikan. Sebagai salah satu langkah yang telah diambil oleh pemerintah adalah memasukkannya dalam program pemerintah sebagai salah satu jalur pemerataan. Wanita yang merupakan sekitar 50% dari seluruh penduduk Indonesia adalah salah satu variabel yang menentukan dalam kesempatan kerja ini. Peningkatan jumlah angkatan kerja antara lain diakibatkan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kaum wanita yang mencari pekerjaan. Keadaan ekonomi dan perubahan struktur kebudayaan dalam masyarakat telah mempengaruhi permintaan akan lapangan pekerjaan, terutama dari kaum wanita. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi cara berpikir kaum wanita Indonesia, menjadi lebih terlibat kemajuan yang ada dan mengembangkan diri dengan menggunakan sarana-sarana yang ada. Semakin banyak kaum wanita yang menuntut ilmu di bangku sekolah semakin banyak pula permintaan akan lapangan kerja. Keadaan-keadaan inilah yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama kalangan yang membutuhkan tenaga kerja, bagaimana kemungkinannya untuk menempatkan pekerja-pekerja wanita guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Wanita pekerja dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu mereka yang mencari pekerjaan sekedar untuk penyaluran hobby atau pengembangan bakat dan karir, dan mereka yang mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau karena tekanan ekonomi. Kelompok yang pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan yang dicari dengan ketrampilan mereka serta pemuasan rohani (kesenangan), faktor kepuasan material menjadi nomor dua bagi mereka. Hal ini sangat berbeda dengan mereka yang termasuk dalam kelompok kedua, mereka lebih banyak menghubungkan pekerjaannya dengan pemenuhan kebutuhan material atau dengan perkataan lain, dengan penghasilan yang mereka terima. Bagi kelompok ini seringkali pemuasan kebutuhan rohani menjadi tidak penting dan mereka lebih banyak bekerja sebagai mesin daripada sebagai manusia yang membutuhkan pemuasan rohani pula. Perlu dijelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan pemuasan kebutuhan rohani antara lain, perasaan senang dan bebas bekerja, perasaan cocok dengan pekerjaan yang ditangani, dan lain-lain.

Melihat dua pengelompokan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kelompok pertama tergantung pada mereka yang membutuhkan kerja itu sendiri, sedangkan kelompok kedua sangat tergantung pada kebutuhan akan tenaga kerja. Sehingga sebenarnya yang menjadi masalah adalah kelompok kedua, karena persaingan mereka dengan tenaga kerja pria lebih besar dibandingkan dengan kelompok pertama. Di samping itu perbedaan standar

upah menjadi semakin dapat dipertahankan oleh pihak yang membutuhkan tenaga kerja, karena kebutuhan akan tenaga kerja wanita biasanya lebih sedikit daripada tenaga kerja pria.

Kesempatan kerja bagi kaum wanita Indonesia hanya dapat diciptakan apabila kita memperhatikan faktor-faktor perbedaan kodrati yang ada antara pria dan wanita dan persamaan hak untuk mengisi kesempatan kerja yang ada. Faktor pertama berhubungan dengan keadaan fisik yang berbeda antara pria dan wanita sehingga kemampuan kerja merekapun berbeda, sedangkan faktor yang kedua berhubungan dengan hak mereka sebagai warga negara. Keadaan ini hanya mungkin tercipta apabila adanya pengertian dari berbagai pihak dan terutama dari yang bersangkutan sendiri. Kaum wanita tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kodrat mereka sebagai seorang wanita dan sebaliknya kaum priapun tidak perlu mengecilkkan peranan seorang wanita dalam usahanya untuk melakukan pekerjaan yang diminatinya.